

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Hubungan Internasional telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan di era globalisasi. Hubungan Internasional yang biasanya terdiri dari Diplomasi tradisional yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang berfokus pada “high politics” seperti keamanan. Dengan bertambah luasnya berbagai bentuk hubungan antar negara, ada pertumbuhan kegiatan internasional berupa “sub-state” seperti pemerintah daerah dan pemerintah lokal. Fenomena ini biasa disebut paradiplomasi (Duchacek, 1990). Paradiplomasi ini banyak dilakukan di Indonesia khususnya pemerintah daerah dengan berbagai aktor luar negeri untuk mencapai kepentingan daerah sendiri yang sesuai dengan ketentuan paradiplomasi di Indonesia. Paradiplomasi pemerintah daerah banyak dilakukan dalam berbagai bidang seperti paradiplomasi ekonomi, pariwisata, investasi, pendidikan dan sebagainya. Salah satunya yang mengimplementasikan paradiplomasi di bidang pendidikan yaitu pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Istilah "paradiplomasi" bermula dengan perdebatan. Pertama, konsep "paradiplomasi" tidak secara teratur digunakan untuk masyarakat yang lebih besar. Namun istilah ini juga digunakan oleh akademisi dan peneliti ilmu sosial dan politik untuk merujuk pada hubungan luar negeri lintas negara yang melibatkan aktor subnegara, yang menjadi topik utama penelitian (Mukti, 2013b). Masyarakat umum, khususnya di Indonesia, lebih mengenal istilah "diplomasi" dan definisinya sebagai "dimaksudkan untuk dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dengan cara apa pun" daripada dengan bentuk klasiknya. Ada sejumlah studi yang dilakukan oleh akademisi Indonesia yang secara tegas menyebut "paradiplomasi" sebagai

topik analisis. Keadaan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memaparkan lebih jauh ungkapan ini kepada masyarakat umum dan pembuat kebijakan dan pelajaran yang mungkin diambil dari praktik yang ada di seluruh dunia, terutama yang ada di sekitarnya.

Dengan munculnya berbagai aktor baru dalam hubungan internasional, serta kekhawatiran baru untuk ditangani, pemerintah pusat di seluruh dunia mencari cara baru untuk memajukan kepentingan mereka sendiri sambil memastikan kepentingan orang lain, dan paradiplomasi adalah salah satunya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memasukkan paradiplomasi dalam pilihan hubungan internasionalnya, dengan yang pertama adalah pengaturan kota kembar antara Bandung dan Braunschweig, Jerman, pada tahun 1960. Pemerintah pusat Indonesia memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah/provinsi untuk berorganisasi, mengelola, dan mengawasi berbagai elemen urusan dalam negeri tanpa campur tangan pemerintah pusat yang besar (Rasid, 2007). Berdasarkan anggapan bahwa pemerintah daerah paling "mengenali" wilayahnya. Paradiplomasi pada awalnya melayani satu atau lebih dari tiga alasan dasar: semata-mata komersial (pasar terbuka dan investasi), berbagai tujuan (ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan), dan identitas regional dan kepentingan politik (Mukti, 2015). Provinsi di seluruh Indonesia mulai melihat peluang yang lebih besar untuk berkolaborasi dengan daerah dan kota di seluruh dunia sebagai hasil dari tujuan tersebut. Nusa Tenggara Barat atau sering disebut Nusa Tenggara Barat adalah salah satunya (NTB).

Pada pertengahan 2018, Ada perubahan konsentrasi paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah NTB Yaitu meningkatkan paradiplomasi melalui Edukasi. Pada pertengahan tahun 2018, terjadi perubahan konsentrasi paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah NTB yaitu meningkatkan paradiplomasi melalui pendidikan. Fokus paradiplomasi provinsi Nusa Tenggara Barat sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: pemanfaatan secara

maksimal aset alam dan sosial NTB, dan pengaruh gubernur yang berkuasa pada saat masyarakat menginginkan "agen perubahan" untuk muncul. Pada pertengahan tahun 2018, terjadi perubahan kecil, dengan semakin meluasnya konsentrasi paradiplomasi NTB dengan memasukkan pendidikan sebagai sektor baru, serta perubahan di pemerintahan: Dr. Zulkieflimansyah terpilih sebagai gubernur baru. Studi ini mengkaji strategi paradiplomasi NTB dan keberhasilan yang diperoleh selama eksekusi antara NTB dan Warsawa, Polandia, untuk mengarahkan tren paradiplomasi saat ini.

Salah satu visi pendidikan NTB yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan di berbagai bidang salah satunya pendidikan. Terpilihnya gubernur baru Dr. Zulkieflimansyah pada tahun 2018, Paradiplomasi Pemerintah NTB fokus pada paradiplomasi pendidikan yang bekerjasama dengan beberapa kampus di Polandia khususnya Warsawa (LPPNTB, 2021a).

Penelitian ini merupakan temuan baru dalam studi praktik paradiplomasi tepatnya di bidang pendidikan antara Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Warsawa, Polandia yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Istilah "paradiplomasi", "pendidikan", dalam judul-judul publikasi yang dikutip di atas sudah menunjukkan bahwa teknik paradiplomasi akan diujicobakan di NTB. Penelitian ini melihat pendekatan yang digunakan gubernur untuk mendorong tren kebijakan paradiplomasi mereka dan tantangan yang muncul selama implementasi, yang merupakan hal baru dari tesis ini.

Gambar 1.1 Peta Kedua Aktor



PETA NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PETA NTB



PETA WARSAWA

Sumber: <https://birokerjasama.ntbprov.go.id/>

Pada gambar 1.1. menunjukkan letak kedua aktor yang malakukan kerjasama Paradiplomasi. Paradiplomasi pemerintah Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk

meningkatkan kondisi ekonomi daerah dengan menjalin hubungan dengan lembaga asing, dan pemerintah melakukannya dengan mengunjungi beberapa provinsi di luar negeri, termasuk provinsi Zhejiang RRC dan lainnya. Menurut Sibawaihi, paradiplomasi mengambil bentuk kota kembar provinsi saudara dan perjanjian investasi asing. Itu adalah solusi yang paling tepat untuk lokasi, sekaligus yang paling sederhana, meskipun prosesnya tidak semudah kelihatannya (Sibawaihi, 2016) dan (Utami, 2017).

Pentingnya branding kota dan provinsi tidak boleh diremehkan, karena menarik kolaborator dan investor akan lebih sulit tanpa item yang sesuai untuk diiklankan ke masyarakat internasional. Polandia melakukan kunjungan ke pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari beberapa pertemuan tersebut, ada pertemuan yang fokus membahas tentang pendidikan. Kunjungan peninjauan pendidikan antara Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Warsawa Polandia. Pada hari Kamis 15 November 2018, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menerima kunjungan dari Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Duta Besar Beata Stockzynska serta rombongannya. NTB dengan permasalahan Pendidikan, mendapatkan peluang untuk mengirim siswa untuk melanjutkan pendidikan di Polandia Warsawa. Melihat pendidikan di Polandia sudah lebih baik dari NTB. Sebaliknya, Warsawa Polandia memiliki kepentingan di NTB dalam hal Investasi (Idham, 2022).

Selain masalah penciptaan citra melalui branding, faktor sosial, budaya, politik, pendidikan, dan geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada saat ini akan sangat menentukan keberhasilan setiap inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan dua pulau utama (Lombok dan Sumbawa) dan bentang alam yang beragam, posisi geografis Provinsi NTB sudah cukup menantang. Tiga kelompok etnis utama (Sasak, Samawa, dan Mbojo) mendominasi provinsi dan tinggal di pulau-pulau, masing-masing dengan tradisi mereka sendiri. Perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik, terutama ketika ada

kecenderungan untuk menekankan superioritas etnis di atas persatuan provinsi (Pratama, 2019), yang selalu ditentang oleh pemerintah. Lebih lanjut, menurut (Laplaza, A., Tanaya, I. G. & Suwardji., 2017) Pola pertumbuhan provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat jangka panjang kaku dan terpusat biasanya menghasilkan koordinasi yang tidak memadai dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah hal yang sulit bagi pemerintah daerah karena, meskipun ada promosi desentralisasi dari pemerintah pusat di beberapa daerah, otoritas tingkat bawah belum menanggapi permintaan tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu kebijakan prioritas dalam paradiplomasi NTB. Pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Visi Pendidikan NTB (Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021) “Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat” dan Pengiriman 1000 sarjana ke sekolah luar negeri, baik di S1, S2 dan S3 tingkat Meningkatkan kemampuan bahasa asing masyarakat NTB melalui program Rumah Bahasa sebagai misinya. Terpilihnya gubernur baru, Dr. Zulkieflimansyah tahun 2018, Paradiplomasi Pemerintah NTB fokus pada paradiplomasi pendidikan bekerjasama dengan beberapa kampus di Polandia, khususnya Warsawa. Warsawa adalah kota di Polandia yang pendidikan tinggi di Polandia. Banyak Universitas yang bekerjasama antara NTB dan Warsawa, Polandia.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan paradiplomasi pemerintah NTB dengan Warsawa-Polandia dalam meningkatkan kualitas edukasi tahun 2018-2021?

1.3. Tujuan Riset

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk:

- a. Menganalisa dinamika proses kerjasama paradiplomasi antara pemerintah NTB-Warsawa, Polandia.
- b. Menganalisa dan menjelaskan berbagai upaya efektif dalam membentuk strategi kesuksesan paradiplomasi Pemerintah NTB dengan Warsawa-Polandia.

1.4. Kontribusi Riset

Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan beberapa kontribusi riset yakni:

- a. Secara akademisi riset, penulis akan menambah pengetahuan akademisi baik untuk Mahasiswa yang mendalami dalam bidang ilmu lainnya khususnya Mahasiswa Hubungan Internasional.
- b. Dalam ranah pembangunan dan praktik riset yang penulis berharap mampu menjadi bahan referensi sekaligus pertimbangan untuk para pemerintahan khususnya wilayah otonomi daerah dalam pembangunan sumber daya manusia (4th Sustainable Development Goals) melalui pendidikan dengan menekankan kerjasama dengan aktor luar negeri.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mereview beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan tema yang berkaitan dengan Paradiplomasi NTB. Dalam beberapa penelitian sebelumnya ada yang membahas tentang paradiplomasi pariwisata, investasi, kota kembar, ekonomi dan pendidikan. Seperti penelitian yang berjudul Paradiplomasi antara Nusa Tenggara Barat dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia 2019-2021. Dalam penelitian ini membahas tentang

paradiplomasi NTB secara umum baik dalam bidang, pariwisata, ekonomi, dan pendidikan (Firmansyah, 2022).

Nusa Tenggara Barat melaksanakan kerjasama ekonomi dengan Belanda, China, dan Denmark. Dalam bidang pariwisata melaksana kerjasama dengan Australia. Dalam bidang pendidikan, kerjasama pendidikan dengan Malaysia, Ceko, Polandia, dan Turki.

Kemudian penelitian lainnya yang berjudul Buka dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia degan Negara Visegard. Tinjauan ini menjelaskan bahwa kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah NTB-Polandia yakni strategi bisnis dengan mengupayakan pemerintah NTB mendesak Polandia agar Sumber daya seperti energi listrik, dan mineral di wilayah Lombok dan Sumbawa.

Melihat dari kajian literatur tersebut, sedikit penelitian yang membahas tentang strategi paradiplomasi NTB dalam pendidikan. Kebanyakan pada penelitian sbelumnya banyak membahas paradiplomasi dalam bidang Investasi. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas strategi paradiplomasi pemerintah NTB dalam meningkatkan edukasi yang dilakukan bersama negara Polandia khususnya Warsawa.

Tabel 1.1 Kajian Literatur

No	Penelitian Terdahulu	Temuan Penelitian
1	(Sibawaihi, 2016) Judul Penelitian: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Membangun Kerjasama Sister Province dengan Zhejiang	Temuan penelitian ini tentang sister city yang terkait dengan paradiplomasi bidang investasi seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan.

	tahun 2014-2015.	Sehingga menggunakan pertimbangan terhadap kebijakan paradiplomasi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, Proses pengambilan keputusannya ketika bekerjasama dengan pemerintah provinsi Zhejiang RRT 2014-2015.
2	(Widiati, 2017) Judul penelitian: Kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Kerjasama Untuk meningkatkan Investasi asing di NTB.	Temuan penelitian ini menjelaskan faktor yang menyebabkan kebijakan Pemerintah NTB dalam membentuk kebijakan investasi asing di NTB.
3	(Laplaza, Tanaya, & Suwardji, 2017)	Temuan penelitian ini menjelaskan tentang Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi koordinasi pemerintah provinsi NTB dalam bekerjasama dengan Aktor luar negeri. Faktor internal tersebut terdiri dari beragam etnis yang menyebabkan banyak perbedaan

		<p>dan pemahaman antar pengambil kebijakan. Sehingga sulit untuk mempromosikan wilayah desentralisasi karena faktor internal tersebut. Dan dampaknya faktor eksternal juga mempengaruhi hal tersebut.</p>
4	<p>(Fathun, 2018)</p> <p>Judul penelitian: Pariwisata Era Ekonomi Digital: Sebuah Implementasi Pilar Kebijakan Poros Maritim di Era Jokowi dalam Konteks Paradiplomacy</p>	<p>Temuan penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi kebijakan paradiplomacy di poros maritim dalam bidanga Priwisata di era ekonomi digital. Penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif. Penemuan dalam penelitian ini yaitu e diplomasi dalam bidang pariwisata saat ini menjadi tolak ukur dalam menciptakan e government.</p>
5	<p>(Pratama, 2018)</p> <p>Judul penelitian: Paradiplomacy Practice in Indonesia: a Lesson From West Nusa Tenggara</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan paradipomasi di Nusa Tenggara Barat pada masa kepemimpinan Tuan Guru</p>

	Province in 2013-201	Bajang yang lebih dominan memprioritaskan paradiplomasi pariwisata halal. Dalam artikel ini terdapat masalah terhadap kebijakan yang diterapkan belum sempurna dikarenakan kesalahan dan isu yang terkait dengan ketimpangan dan kurangnya manajemen yang mumpuni menjadi poin kritik oleh banyak orang, baik dari kalangan publik maupun pejabat. sehingga menggunakan teori pilihan rasional (Rational Choice).
6	(Surya & Bukhari, 2019) Judul penelitian: Peluang Dan Tantangan Kerjasama Investasi Indonesia dengan Negara Negara Visegard	Temuan Penelitian ini membahas tentang peluang dan tantangan kerjasama investasi antara Indonesia dengan negara-negara Visegard yang menggunakan konsep diplomasi ekonomi. Ada beberapa peluang yang dijelaskan dalam penelitian ini yaitu potensi besar investasi karena ada kesamaan tujuan antara keduanya

		<p>dengan menggunakan diplomasi ekonomi yang membuat investasi menjadi mudah di Indonesia. Sedangkan tantangannya yaitu belum ada kejelasan terkait diplomasi ekonomi yang jelas dan terukur, posisi geografis yang sangat jauh, dan kerjasama yang masih terbatas dalam bentuk hubungan bilateral.</p>
7	<p>(Firmansyah, 2022)</p> <p>Paradiplomasi antara Nusa Tenggara Barat dengan Kujawsko-Pomorskie Polandia 2019-2021</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam draft LOI dan MOU banyak memuat kerjasama dalam bidang promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, dan peningkatan sumber daya manusia.</p>
8	<p>(Alvarez, 2020) dan (Paquin, 2022)</p>	<p>Buku ini menjelaskan tentang Perdebatan dalam urusan internasional tampaknya terbagi menjadi dua dunia: dunia negara (bidang analisis politik) ilmu</p>

		<p>pengetahuan dan hubungan internasional) dan aktor non-pemerintah (di mana studi lebih bersifat ekonomis dan terbatas pada wilayah nasional). Paradiplomasi menghasilkan jeda dalam perdebatan itu, karena itu memperkenalkan dunia ketiga di mana pemerintah non-pusat adalah aktor internasional asli, yang tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan instrumen ekonomi maupun teori hubungan internasional. Klasik model analisis internasional tidak memiliki alat untuk memahami kondisi politik dan konstitusional non-pusat pemerintah dalam hubungan internasional dan tidak melihat pilihan mekanisme, batasan dan hubungan pemerintah non-pusat dengan Negara. Oleh karena itu, korpus analitik baru tidak dapat</p>
--	--	--

		<p>dihasilkan dari satu disiplin ilmu tetapi harus mengintegrasikan beberapa di antaranya ke dalam perspektif internasional yang dibangun dari lokal.</p>
9	<p>(Harakan et al., 2021)</p> <p>Judul penelitian: Sustainable Energy Investment through Paradiplomacy Practices in South Sulawesi, Indonesia.</p>	<p>Temuan penelitian ini menjelaskan tentang paradiplomasi investasi dalam bidang energy . Penggunaan energi di negara berkembang ditandai dengan keterlibatan pemerintah dalam mewujudkan alih penggunaan energi dari konvensional menjadi terbarukan. Keterlibatan ini sejalan dengan keberlanjutan program Tujuan pembangunan, yang menekankan perlunya tindakan dalam menggunakan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di pelaksanaan pembangunan. Pilihan yang tepat dalam mewujudkan dominasi energi terbarukan adalah melalui</p>

		<p>investasi dan kerjasama dengan mitra dari luar negeri yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam penggunaan dari energi terbarukan. Investasi mandiri dan kerjasama dapat diwujudkan dengan praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian dan penyebarluasan gagasan dalam artikel ini bertujuan untuk membahas tentang dinamika investasi energi terbarukan dalam praktik paradiplomasi. Dukungan pemerintah pusat dan daerah pemerintah diwujudkan dalam ketersediaan peraturan, izin yang tidak ribet, dan promosi yang relevan yang mendukung terwujudnya pemanfaatan energi terbarukan dan alih teknologi.</p>
--	--	--

Berdasarkan kajian literatur diatas, Penelitian sebelumnya banyak membahas penelitian paradiplomasi dalam bidang pariwisata, ekonomi, dan Investasi. Dalam buku Paradiplomasi Kerjasama luar negeri oleh Pemda di Indonesia karya Takdir ali mukti mengatakan bahwa Pemda menjalin hubungan kerjasama internasional untuk meningkatkan ekonomi daerah dan dukungan terhadap program kerja di berbagai sektor seperti Pariwisata, kesehatan, ekonomi, investasi, dan pendidikan.

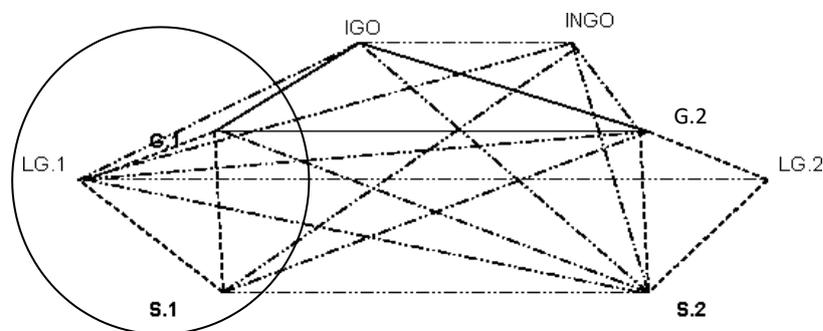
Dalam penelitian ini, penulis menemukan novelty paradiplomasi NTB dalam pendidikan. Dalam paradiplomasi NTB ini bekerjasama dengan Warsawa-Polandia. NTB dengan ranking pendidikan yang masih rendah bekerjasama dengan Warsawa-Polandia yang tingkat pendidikannya lebih baik. Menurut analisa penulis, Dalam penelitian ini mendalami kerjasama paradiplomasi melalui pendidikan sebagai salah satu untuk mewujudkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB. Sesuai dengan Sustainable Development Goals yang ke-4 yakni kesetaraan pendidikan (Equality of Education), NTB mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan strategi dalam paradiplomasi pendidikan NTB dengan Warsawa, Polandia.

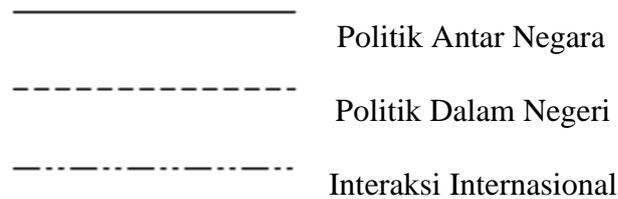
1.6. Kerangka Teori

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori paradiplomasi yang menjadi dasar dan acuan kerangka teori dalam menganalisa penelitian tesis ini. Teori paradiplomasi ini diawali dengan beberapa perdebatan akademik tahun 1980-an yaitu seorang ilmuwan yang bernama Panayotis Soldatos dari Basque. Berawal dari 2 penggabungan istilah Parallel Diplomacy menjadi paradiplomacy yang memiliki makna 'the foreign policy of non-central governments' (Takdir Ali Mukti, 2013).

Istilah paradiplomasi, pendidikan, dan sister city (Kota kembar) menunjukkan bahwa strategi Paradiplomasi yang digunakan pemerintah NTB. Penelitian ini melihat pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mendorong efektifitas kebijakan paradiplomasi pemerintah NTB dalam bidang kerjasama pendidikan NTB-Warsawa. Menurut Sibawaihi, paradiplomasi merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri. Hal tersebut merupakan solusi yang tepat dan efektif, meskipun prosesnya tidak mudah (Sibawaihi, 2016) and (Utami, 2017). Pentingnya kerjasama daerah otonom dengan internasional tidak boleh diremehkan, karena hal tersebut menarik aktor yang ingin bekerjasama dalam berbagai aspek (Subarkah, 2018). Secara kompleks hubungan dan aktor baik states, substates, dalam Hubungan Internasional ini dirangkai dalam sebuah skema. Dimana pemerintah lokal atau Local Government (LG) masuk ke pola Hubungan Internasional yang terdiri dari Government (G), Society (S), Inter Government Organization (IGO), dan International Non Government Organization (INGO), Sebagaimana dilakukan oleh Mohtar Mas'oeed, pola Hubungan Internasional daerah otonom sebagai berikut:

Gambar 1.2. Hubungan antara Society, Government, Local Government, International Government Organization, International Non Government Organization





Sumber: Mohtar Mas' oed Patter of International Relations

Pada skema diatas, Daerah otonom menjadi 2 garis titi temu, yakni garis pertama (1) menunjukkan interaksi semua urusan domestik, Local Government (LG) dan Society (S), bertemu dengan garis kedua (2) yakni garis yang menunjukkan interaksi dalam urusan luar negeri. Disinilah pada pertemuan garis tersebut Daerah otonom antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pihak asing. Garis taut antara Pemerintah Daerah dengan sub-state merupakan peran sebagai aktor paradiplomasi. Dalam hal ini, Daerah otonom dalam pemerintah daerah tidak boleh dikesampingkan. Mengingat bahwa daerah otonom mampu melakukan hubungan dengan sub state secara langsung dengan aktor non pemerintah, dimana aktor non pemerintah dengan leluasa menjalin kerjasama tanpa melibatkan pemerintah pusat. Aktor dalam kerjasama ini dapat berupa masyarakat, kelompok, suku suku, kelompok ekonomi, perusahaan multinasional dan bagian birokrasi pemerintah suatu negara.

Untuk melaksanakan kewenangan dalam paradiplomasi ini, Tulus Warsito mengatakan bahwa selama masih dalam garis Undang Undang dan dalam konteks diplomasi damai, daerah otonom dalam pemerintah daerah boleh mengambil beberapa bentuk kegiatan diplomasi melalui pariwisata, perdagangan, olahraga, dan kesenian (Warsito, Tulus. Kartikasari, 2007a). Revolusi saat ini dalam menghadapi industri 4.0., Paradiplomasi merupakan instrumen bagi pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan aktor

internasional(Surwandono et al., 2021). Dalam hal ini Pemerintah Nusa Tenggara Barat membangun lembaga dan mengembangkan virtual paradiplomacy melalui website Biro Kerjasama Internasional yang bisa diakses <https://birokerjasama.ntbprov.go.id/> dan paradiplomasi pendidikan melalui link <https://www.lppntb.com/program/beasiswa-ntb>.

1.7. Hipotesis

Dalam penelitian ini memaparkan hipotesis bahwa Paradiplomasi Pemerintah NTB dengan Warsawa dalam Meningkatkan Edukasi di NTB dilaksanakan dengan memberikan beasiswa dengan beberapa Kebijakan Paradiplomasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah luar negeri, dan kebijakan pemerintah daerah dengan beberapa lembaga yang terkait dengan struktur birokrasi.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Untuk kajian pustaka menggunakan alat Vosviewer untuk menentukan novelty tesis. Data dikumpulkan melalui karya ilmiah (Jurnal, Scopus, Google Scholar) buku, berita dll. Selain itu juga data dikumpulkan dengan wawancara, dan dokumentasi. Metode kualitatif ini untuk menjelaskan kebijakan Paradiplomasi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan Warsawa Polandia tahun 2018-2022.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisa dokumen. Wawancara dilakukan dengan tiga informan yaitu Kepala Bidang Kerjasama Luar Negeri NTB (informan 1), Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan NTB (informan 2), dan perwakilan dari pemerintah NTB yang terlibat dalam proses kerjasama NTB-Polandia (informan 3) dan Kepala Biro Riset dan Inovasi daerah NTB (Informan 4) . Data dalam penelitian ini didukung dengan wawancara dan telaah dokumen.

1.9. Teknik Analisis Data

1. Mengumpulkan data tentang fenomena yang diteliti baik data yang tertulis maupun data yang didapat secara wawancara.
2. Mengolah data melalui alat Vosviewer, analisis data scopus. Pengolahan data ini untuk memilih kategori yang dibutuhkan oleh sub bab penelitian sesuai data fakta.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, penulis merincikan beberapa sistematika penulisan penelitian tesis ini yang dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB 1 penulis membahas fundamental penelitian tesis yang terdiri dari proposal tesis seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan riset, kontribusi riset, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II penulis membahas tentang Pengelolaan Paradiplomasi di Indonesia.

BAB III penulis membahas tentang permasalahan pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

BAB IV penulis membahas tentang kebijakan paradiplomasi pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Warsawa Polandia dalam meningkatkan edukasi tahun 2018-2022.

BAB V penulis memberikan kesimpulan dan menambahi saran yang menjadi bahan pertimbangan untuk paradiplomasi yang dilakukan oleh daerah otonom atau pemerintah daerah. Serta penguatan teori paradiplomasi sebagai Sarana kerjasama pemerintah daerah dengan Internasional yang efektif.